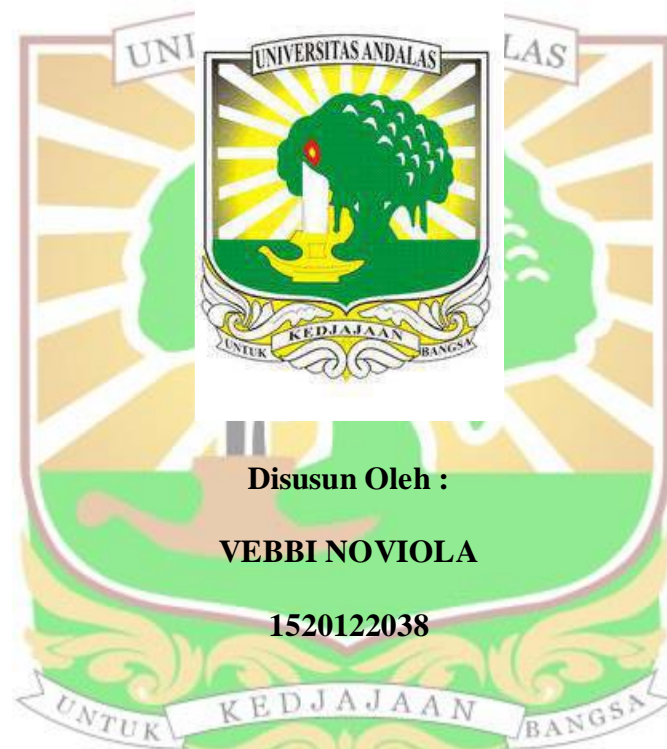


TESIS
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN
AKTA YANG BERKAITAN DENGAN HAK WARIS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT)

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan



Disusun Oleh :

VEBBI NOVIOLA

1520122038

Dosen Pembimbing :

Prof. H. FIRMAN HASAN, S.H., LL.M.

Dr. BUSYRA AZHERI, S.H., M.H.

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN
AKTA YANG BERKAITAN DENGAN HAK WARIS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT)**

ABSTRAK

**(Vebbi Noviola, 1520122038, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
115 halaman, Padang, 2018)**

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT, Notaris dijadikan tergugat dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan hak waris, hal ini menimbulkan adanya konsekuensi yuridis terhadap pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat pembuat surat keterangan waris tersebut. Tesis ini akan merumuskan permasalahan, *Pertama*, pertimbangan hukum oleh hakim untuk menentukan ahli waris atas harta warisan yang disengketakan pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT, *Kedua*, tanggung jawab notaris atas kebenaran akta yang berkaitan dengan hak waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang diawali dengan pengumpulan dan penyusunan data yang dilanjutkan dengan pengkajian data untuk memperoleh gambaran mengenai surat keterangan waris, selanjutnya penulis melakukan pendekatan secara Yuridis Normatif yang bersifat analitis, melalui bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu menganalisa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa *Pertama*, pertimbangan hukum oleh hakim untuk menentukan ahli waris atas harta warisan yang disengketakan pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT, yaitu berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh para penggugat (alat bukti tertulis dan saksi) dan para penggugat yang merupakan ahli waris golongan I dari harta orang tua para penggugat. *Kedua*, tanggung jawab notaris secara mengenai kebenaran terhadap surat keterangan waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/pdt.G/2014/PN.BT, adalah tanggung jawab secara perdata mengenai SKW yang dibuatnya, sanksi yang dituntut para penggugat dari perbuatan hukum yang ditimbulkan yaitu para penggugat termasuk notaris dituntut untuk membayar biaya perkara persidangan, sedangkan dalam pembuatan surat keterangan hak waris, notaris hanya sekedar bertanggungjawab terhadap formalitas dari suatu akta dan tidak terhadap materil akta tersebut, tidak ada undang-undang yang mengatur bagi notaris untuk mencari tahu kebenaran materil dalam proses pembuatan SKW.

Kata Kunci: Tanggungjawab Notaris, Surat Keterangan Waris

RESPONSIBILITY OF NOTARY ON THE DEED MAKING WHICH RELATED WITH LEGACY RIGHT

(Case Study of District Court Decision of Bukittinggi No. 7/pdt.G/2014/PN.BT)

ABSTRACT

(Vebbi Noviola, 1520122038, Magister of Notary, Law Faculty, Andalas University, 115 pages, Padang, 2018)

Notary as a public official authorized to make an authentic deed which may be liable for his actions that related with his work in making the deed. On the Decision of District Court No. 7/Pdt.G/2014/PN.BT, Notary could been a defendant on deed making which related to legacy rights, this creates a legal consequence to the notary's accountability as the public official of the making of that Inheritance Certificate. This research will formulate the problem, First, the legal considerations by the judge to determine the heirs of the inherited property in the Decision of the Bukittinggi District Court No. 7/pdt.G/2014/PN.BT, Second, the notary's responsibility for the authenticity of the deed relating to the legacy rights in the Decision of the Bukittinggi District Court No. 7/pdt.G/2014/PN.BT. The analytical method that used in this research is analytical descriptive method that begins with the collection and compilation of data that followed by the assessment of data to obtain a description of the certificate of inheritance, after that the author did approachment based on the Juridical Normative that is analytical, through materials bibliography and field research such as analyzing the documents related to the research. Based on the results of this research, it can be seen that First, the legal considerations by the judge to determine the heirs of the inherited property on the Decision of the Bukittinggi District Court No. 7 /pdt.G/2014/PN.BT, that is based on the verification which done by the plaintiffs (written evidences and witnesses) and the plaintiffs who are the heirs in category class I of their parents property. Second, the responsibility of a notary concerning the authenticity of the inheritance certificate in the Decision of the Bukittinggi District Court No. 7/pdt.G/2014/PN.BT, is the civil responsibility of the certificate of inheritance that he made, the sanctions which claimed by the plaintiff from the inflicted legal action that is the plaintiffs including the notary is required to pay court fees, whereas in making the certificate of inheritance rights, the notary is only responsible for the formalities of a deed and not on the material of the deed, there is no law which regulating for the notary to find out the truth of the material in the process of making the certificate of inheritance.

Kata Kunci: Responsibility of Notary, Inheritance Certificate